PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN PERBANKAN DI INDONESIA

Nathasya Riva Carissa, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: nathasya.217232048@stu.untar.ac.id

Mella Ismelina Farma R, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: mellaismelina@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta kewajiban hukum penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan (*borgtocht*), khususnya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta mengevaluasi efektivitas alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dalam memberikan perlindungan hukum kepada penjamin. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *borgtocht* merupakan perjanjian *accessoir*, penjamin tetap memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase dianggap lebih efisien dan dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak, termasuk penjamin, selama pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Borgtocht*, Penjamin, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perbankan

ABSTRACT

*This study aims to analyze the role and legal obligations of the guarantor in a personal guarantee agreement (*borgtocht*), especially in resolving disputes outside the court, and to evaluate the effectiveness of alternative dispute resolutions such as mediation and arbitration in providing legal protection to the guarantor. The method used is normative legal research with a descriptive analytical approach, based on a literature study of laws and regulations, doctrines, and related court decisions. The results of the study indicate that although *borgtocht* is an accessory agreement, the guarantor still has significant legal responsibility in the event of default by the debtor. Dispute resolution through non-litigation channels such as mediation and arbitration is considered more efficient and can provide adequate legal protection for the parties, including the guarantor, as long as its implementation still refers to the principles of justice and legal certainty.*

Key Words: Legal Protection, *Borgtocht*, Guarantor, Alternative Dispute Resolution, Banking

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia ekonomi dan perdagangan membawa konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas perbankan, salah satunya dalam bentuk pinjaman. Pinjaman ini umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, yakni perjanjian yang isinya telah ditentukan sepihak oleh pihak bank

sebagai kreditor. Ketentuan sepihak ini menciptakan potensi ketimpangan dalam kedudukan hukum antara kreditor dan debitur

Bank, sebagai lembaga intermediasi keuangan, memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga (UU No. 10 Tahun 1998). Kredit tersebut menjadi salah satu instrumen utama bagi bank dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama untuk sektor usaha kecil dan menengah.¹

Namun, dalam praktik pemberian kredit, tidak dapat dihindari adanya risiko gagal bayar oleh debitur. Untuk mengurangi risiko tersebut, digunakan lembaga jaminan yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak bank. Hukum jaminan mengenal dua jenis jaminan, yaitu jaminan kebendaan (seperti gadai dan hak tanggungan) dan jaminan perorangan (penanggungan atau borgtocht).²

Jaminan perorangan merupakan perikatan yang bersifat accesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokoknya. Dalam Pasal 1820 KUH Perdata, dijelaskan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga, yakni penanggung, menyatakan kepada kreditor bahwa ia akan memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tersebut ingkar janji. Dalam hal ini, posisi penanggung sebagai pihak ketiga memiliki kedudukan hukum tersendiri yang menuntut kepastian dan perlindungan hukum.³

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, penggunaan jaminan perorangan dalam praktik hukum sangat relevan karena adanya hubungan ekonomi dan kepercayaan antara penanggung dan debitur. Selain itu, pemerintah sendiri mendorong penggunaan borgtocht untuk memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha kecil melalui skema-skema penjaminan kredit.⁴ Walau bersifat turunan dari perjanjian pokok, perjanjian penanggungan tetap memiliki kekuatan mengikat, kecuali apabila perjanjian pokoknya dibatalkan karena alasan yang melekat pada pribadi debitur. Dalam hal ini, perjanjian penanggungan tetap dapat berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian hukum terhadap bentuk jaminan perorangan dalam perbankan, khususnya dalam hal terjadinya wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian penanggungan.⁵

¹ Kompas.com, 2022; OJK, 2022; JurnalPost, 2021

² Nurhadi, S. & Wulandari, P. "Peran Jaminan dalam Mengurangi Risiko Kredit Bermasalah pada Perbankan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis* 15, no. 1 (2023): 45-58.

³ Setiawan, R. "Aspek Hukum Jaminan Perorangan dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 120-134.

⁴ Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2015

⁵ Sari, D. P. "Pengelolaan Risiko Kredit dengan Jaminan dalam Sistem Perbankan di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 12, no. 3 (2021): 201-215.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) terhadap perjanjian borgtocht menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apa Bentuk perlindungan hukum bagi penjamin dalam proses penyelesaian sengketa perjanjian borgtocht di luar pengadilan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis peran penjamin dalam perjanjian borgtocht, termasuk kewajiban hukum yang timbul bagi penjamin dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan perjanjian borgtocht dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi penjamin.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur hukum seperti undang-undang, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai substansi hukum jaminan perorangan (borgtocht) dalam praktik perbankan dan perjanjian kredit. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada studi pustaka untuk mengkaji kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian penanggungan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menguraikan dan menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku serta permasalahan hukum yang timbul secara komprehensif.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Perjanjian Borgtocht Menurut Hukum Positif di Indonesia

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) terhadap perjanjian borgtocht dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian borgtocht, yang merupakan bentuk jaminan pribadi, diatur dalam Pasal 1820 hingga 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktik perbankan, borgtocht sering digunakan sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit.⁷

⁶ Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana. (2022).

⁷ Na'im, K., & Soadun Harahap, F. S. Menetapkan Perjanjian Kredit yang Adil untuk Pinjaman yang Bermasalah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024).

Ketika terjadi sengketa antara kreditur dan penjamin (borg), penyelesaian dapat dilakukan melalui APS, yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Proses ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. Sebagai contoh, dalam praktik perbankan, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, bank dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, namun seringkali diarahkan untuk menyelesaikan melalui mediasi yang menghasilkan akta perdamaian. Namun, pelaksanaan APS dalam sengketa borgtocht menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap mekanisme APS, sehingga mereka lebih memilih penyelesaian melalui pengadilan. Selain itu, dalam praktiknya, perjanjian borgtocht sering kali dibuat dalam bentuk baku oleh pihak bank, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan penjamin⁸

Untuk meningkatkan efektivitas APS dalam penyelesaian sengketa borgtocht, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada para pihak mengenai manfaat dan prosedur APS. Selain itu, perlu adanya pengawasan terhadap pembuatan perjanjian borgtocht agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.⁹

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) terhadap perjanjian borgtocht dalam hukum positif Indonesia mencakup peran penting Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). LAPSPI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014, menyediakan tiga layanan utama: mediasi, adjudikasi, dan arbitrase, untuk menyelesaikan sengketa perbankan secara efisien dan adil¹⁰

Proses penyelesaian sengketa di LAPSPI dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang bersengketa. Case manager LAPSPI kemudian melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa sengketa tersebut termasuk dalam kategori sengketa perbankan dan belum pernah diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga lain. Jika memenuhi syarat, proses dilanjutkan dengan pengecekan kompetensi absolut untuk memastikan adanya perjanjian penyelesaian sengketa melalui LAPSPI¹¹

Dalam konteks perjanjian borgtocht, mediasi menjadi pilihan utama karena sifatnya yang non-adversarial dan fokus pada pencapaian kesepakatan bersama. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan. Jika mediasi tidak berhasil, para pihak dapat memilih adjudikasi, yang merupakan proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang netral dan menghasilkan keputusan yang mengikat. Namun, adjudikasi di LAPSPI

⁸ Shalilah, G. K. Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).

⁹ Putra, A. A. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Doctoral dissertation, Brawijaya University. (2014).

¹⁰ Pradipta, Y. G., & Kharisma, D. B. Proses Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 293-301.

¹¹ Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Manajemen Risiko pada Bank Umum (Revisi 2023)

hanya berlaku untuk sengketa dengan nilai klaim tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹²

Arbitrase merupakan opsi terakhir dalam penyelesaian sengketa di LAPSPI. Proses ini melibatkan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase cocok digunakan jika para pihak menginginkan penyelesaian sengketa yang lebih formal dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Meskipun LAPSPI menawarkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap keberadaan dan manfaat LAPSPI. Selain itu, dalam praktiknya, perjanjian borgtocht sering kali dibuat dalam bentuk baku oleh pihak bank, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan penjamin¹³

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPSPI. Selain itu, perlu adanya pengawasan terhadap pembuatan perjanjian borgtocht agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui APS, khususnya melalui LAPSPI, memberikan alternatif yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa perjanjian borgtocht. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada solusi bersama, APS dapat menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif.¹⁴

3.2 Bentuk perlindungan hukum bagi penjamin dalam proses penyelesaian sengketa perjanjian borgtocht di luar pengadilan

Perlindungan hukum bagi penjamin dalam proses penyelesaian sengketa perjanjian borgtocht di luar pengadilan merupakan isu penting dalam praktik perbankan di Indonesia. Perjanjian borgtocht, sebagai bentuk jaminan pribadi, diatur dalam Pasal 1820 hingga 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi penjamin sering kali belum optimal, terutama ketika penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan.¹⁵

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi penjamin adalah melalui penyusunan perjanjian borgtocht yang adil dan tidak memberatkan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa perjanjian borgtocht sering kali dibuat dalam bentuk baku oleh pihak bank, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara

¹² Pradipta, Y. G., & Kharisma, D. B. Proses Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 293-301.

¹³ Kurniawan, Aditya. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui LAPSPI." *Jurnal Hukum dan Resolusi Sengketa* 10, No. 1 (2023).

¹⁴ Napitupulu, Rizky D. "Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit dan Ketidakseimbangan Para Pihak." *Jurnal Hukum Bisnis* 7, No. 2 (2022).

¹⁵ Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, R. Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023), 159-177.

kreditur dan penjamin. Sebagai contoh, dalam perjanjian borgtocht di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jombang, penjamin diminta untuk melepaskan hak-hak istimewanya, termasuk hak untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda debitur jika terjadi kredit macet. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase, dapat memberikan perlindungan hukum bagi penjamin. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menyediakan layanan mediasi, adjudikasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa perbankan secara efisien dan adil. Namun, efektivitas mekanisme ini bergantung pada kesadaran dan kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif¹⁶

Perlindungan hukum juga dapat diperkuat melalui pengawasan terhadap pembuatan perjanjian borgtocht agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, perjanjian borgtocht sering kali mengesampingkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin, sehingga penjamin tidak memiliki perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet. Oleh karena itu, perlu adanya penataan draft perjanjian jaminan perorangan yang menegaskan bahwa penjamin adalah jaminan cadangan setelah eksekusi aset yang dimiliki oleh debitur. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi penjamin dalam proses penyelesaian sengketa perjanjian borgtocht di luar pengadilan dapat ditingkatkan melalui penyusunan perjanjian yang adil, pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dan pengawasan terhadap praktik perbankan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁷

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah dibahas perlindungan hukum bagi penjamin dalam perjanjian borgtocht di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi, adjudikasi, dan arbitrase menawarkan solusi yang lebih efisien dibandingkan litigasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman para pihak terhadap mekanisme ini. Perlindungan hukum bagi penjamin perlu ditingkatkan melalui penyusunan perjanjian yang adil dan tidak memberatkan, serta pengawasan terhadap praktik perbankan yang sering kali mengesampingkan hak-hak penjamin. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian borgtocht.

¹⁶ Putra, A. A. *Perlindungan Hukum Bagi Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* (Doctoral dissertation, Brawijaya University. (2014).

¹⁷ Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius. (2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, R. "Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 30, no. 1 (2023): 159-177.
- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)". Jakarta: Kencana. 2022.
- Kurniawan, Aditya. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui LAPSPI." *Jurnal Hukum dan Resolusi Sengketa* 10, No. 1 (2023).
- Na'im, K., & Soadun Harahap, F. S. 2024. "Menetapkan Perjanjian Kredit yang Adil untuk Pinjaman yang Bermasalah". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6.
- Napitupulu, Rizky D. "Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit dan Ketidakeimbangan Para Pihak." *Jurnal Hukum Bisnis* 7, No. 2 (2022).
- Nurhadi, S. & Wulandari, P. "Peran Jaminan dalam Mengurangi Risiko Kredit Bermasalah pada Perbankan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 15, no. 1 (2023): 45-58.
- Putra, A. A. "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Doctoral dissertation" , Brawijaya University. 2014.
- Pradipta, Y. G., & Kharisma, D. B. "Proses Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 293-301.
- Rahim, A. "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik". Humanities Genius. 2022.
- Sari, D. P. "Pengelolaan Risiko Kredit dengan Jaminan dalam Sistem Perbankan di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 12, no. 3 (2021): 201-215.
- Setiawan, R. "Aspek Hukum Jaminan Perorangan dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 120-134.
- Shalilah, G. K. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian". *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).
- Shubhan, M. H. Hukum Kepailitan. Prenada Media. 2015.
- Sidharta, H. P. K. I. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi. Grasindo, Jakarta. 2016.
- Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty. 2015.

Peraturan perundangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang "Manajemen Risiko pada Bank Umum" (Revisi 2023)